



STRATEGI PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) DI KOTA PEKALONGAN

Tri Puji Astuti

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan

Email: astuti.azzahra@gmail.com

Diterima : 30 September 2024

Disetujui : 14 Desember 2024

Abstract

At the beginning of 2024, Pekalongan City received ATS data from Dapodik Kemendikbudristek RI as many as 1,739 ATS Graduated and didn't continue school / Dropped Out. Efforts to handle ATS have been carried out since 2021, especially in 2024, Pekalongan City will become one of the locus for replicating good practices for handling ATS organized by the Central Java Provincial Government in collaboration with UNICEF Representatives for Java and Bali. This research aims to determine the strategies that need to be carried out by the Pekalongan City Government in handling ATS in Pekalongan City in order to obtain optimal results. Using quantitative or qualitative data from primary and secondary data, research was carried out using SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), namely identifying and evaluating internal and external factors that support or do not support the handling of ATS in Pekalongan City. From the results of data collection (field verification) as of August 31 2024, it was found that the 5 (five) most activities of ATS were as workers (53.52%), no routine activities (38.30%), playing with Hand-Phones (3.56%), taking care of families (1.89%), and street children (1.14%). Based on causal aspects, social aspects are the most dominant aspect (33.46%), followed by culture (23.39%), economy (20.67%), and services (3.10%). From the research results, it was found that handling ATS needs to receive attention and support from all participants because handling ATS is not the responsibility of one Regional Apparatus but rather multi-stakeholders including the government, educational institutions, non-governmental organizations and the community. The strategy for handling ATS is carried out through: Strengthening and developing regional policies and regulations, Strengthening and developing institutions or organizations, Strengthening data collection and application development, Increasing access and quality of equal education services, and Strengthening literacy and capacity of communities and apparatus.

Keywords: *Children Out of School (ATS), Strategy for Handling ATS, Pekalongan City*

1. PENDAHULUAN

Undang-undang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar dan setiap warga negara wajib mengikutinya.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa misi pertama presiden adalah "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" dengan agenda pembangunan yaitu

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing, melalui peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Selanjutnya, dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, pembangunan bidang pendidikan terdapat dalam misi yang kedua, yaitu "Mewujudkan SDM yang Religius, Kompeten dan Produktif guna Menjawab Tantangan Era Perubahan", dengan tujuan Organisasi Perangkat Daerahnya yaitu meningkatkan akses pendidikan.

Pada tahun 2024 Kota Pekalongan bersama 14 (empat belas) kota/kabupaten lainnya di Jawa Tengah menjadi lokus replikasi praktik baik Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS)

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan Jawa dan Bali. Dari data Lulus Tidak Melanjutkan/*Drop Out* (LTM/DO) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek RI diketahui bahwa pada awal tahun 2024 di Kota Pekalongan terdapat 1.739 (seribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) Anak Tidak Sekolah *By Name By Address*.

Dari hasil evaluasi atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) pada triwulan I dan II tahun 2024 diketahui bahwa capaian tingkat warga negara usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan, yang merupakan indikator Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan, belum mencapai target yang telah ditetapkan. Demikian juga capaian atas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan, capaian pada tahun 2023 baru sebesar 22,76% dari target 100% (sumber: Rapot Pendidikan Kota Pekalongan Kemendikbudristek RI 2024).

Penanganan Anak Tidak Sekolah tidak dapat dilakukan oleh satu perangkat daerah saja tetapi harus dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah semata, tetapi perlu melibatkan masyarakat, komunitas atau organisasi masyarakat, akademisi, dan pihak swasta. Penanganan ATS tidak dapat berjalan optimal tanpa didukung oleh SDM, kelembagaan, ataupun infrastruktur, termasuk koordinasi, kolaborasi, serta pengaturan keterlibatan dan peran dari masing-masing *stakeholder*.

Melihat cukup pentingnya permasalahan ATS serta bagaimana upaya mengatasinya, maka perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS. Penelitian ini dilakukan dengan melihat permasalahan ATS serta upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hingga waktu penerimaan peserta didik baru tahun ini usai (Agustus 2024). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS di Kota Pekalongan dengan melibatkan berbagai pihak agar hasil yang diharapkan dapat

optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan ataupun saran dalam penyempurnaan penanganan ATS yang telah, sedang, ataupun akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

2. GAMBARAN UMUM

Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 46,42 km². Terbagi atas empat kecamatan, yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Utara, dengan batas administratif sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan wilayah Kabupaten Batang, sebelah selatan dengan wilayah Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, dan sebelah barat dengan wilayah Kabupaten Pekalongan.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 317.524 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 97.191 jiwa, disusul Kecamatan Pekalongan Utara 80.994 jiwa, Pekalongan Timur 70.226 jiwa, dan Pekalongan Selatan 69.810 jiwa. Jumlah dan persebaran penduduk, luas wilayah, dan kepadatan penduduk berdasarkan wilayah administrasi kecamatan tersaji dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023

Kecamatan / Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan (jiwa/km ²)
Pek. Barat	97.191	30,61	10,00	9.719,10
Pek. Selatan	69.810	21,99	11,47	6.086,31
Pek. Timur	70.226	22,12	9,63	7.292,42
Pek. Utara	80.994	25,49	15,32	5.286,81
Kota Pekalongan	317.524	100,00	46,42	6.840,24
Tahun 2022	309.742	100,00	46,42	6.672,60
Tahun 2021	308.310	100,00	46,42	6.641,75

Sumber: RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, Bappeda, 2024

Bila dilihat dari usia sekolah, maka jumlah penduduk usia SD/MI (7-12 tahun) menempati urutan pertama sebesar 31.876 jiwa, selanjutnya SMP/MTs (13-15 tahun) sebesar 15.277 jiwa, dan SMA/SMK/MA sebesar 14.959 jiwa.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Usia Sekolah Kota Pekalongan TA. 2023/2024

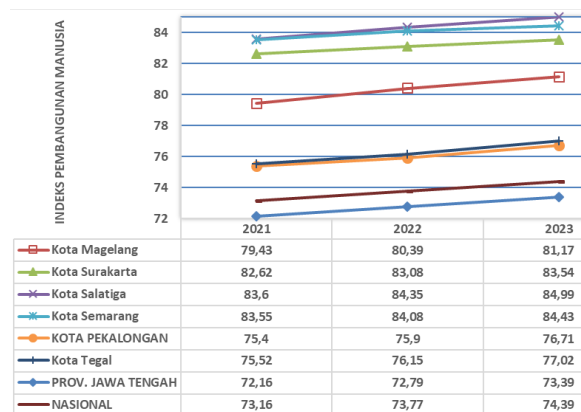
Kecamatan/ Kota	7-12		13-15		16-18	
	L	P	L	P	L	P
Pek. Barat	4.905	4.601	2.395	2.160	2.391	2.113
Pek. Selatan	3.718	3.504	1.684	1.628	1.643	1.537
Pek. Timur	3.698	3.610	1.793	1.744	1.732	1.587
Pek. Utara	4.123	3.717	1.985	1.888	2.035	1.913
Kota Pekalongan	16,444	15,432	7,857	7,420	7,801	7,150
Tahun 2022	16.284	15.410	8.041	7.384	7.618	7.125
Tahun 2021	16.349	15.375	7.886	7.223	7.888	7.379

Sumber: Rekap Profil Pendidikan 2023, Dinas Pendidikan, 2024

2.1. Capaian Pembangunan Pendidikan**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

sebagai indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia terdiri dari tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat dengan indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), pengetahuan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dan standar hidup layak dengan ukuran pengeluaran per kapita.

IPM Kota Pekalongan lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Tengah maupun IPM nasional, namun demikian bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan berada di urutan kedua dari bawah setelah Kota Tegal. Grafik IPM Kota Pekalongan dengan Kota-kota lain di Jawa Tengah ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.



Sumber: IPM 2023, BPS, 2024

Gambar 1. IPM Kota Pekalongan dan Kota Lain se-Jawa Tengah Tahun 2021-2023

IPM Kota Pekalongan meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Indikator lengkap atas komponen IPM tersebut tersaji dalam tabel di bawah ini.

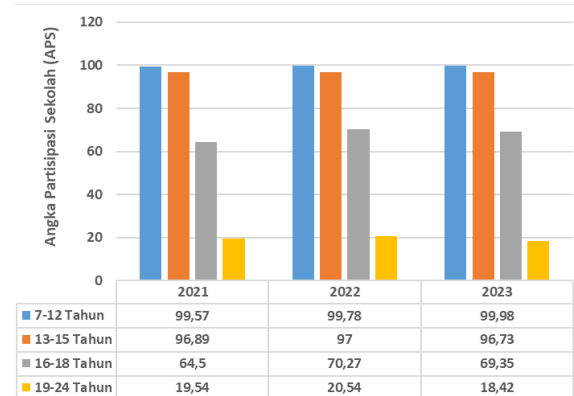
Tabel 3. Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Tahun	UHH (tahun)	RLS (tahun)	HLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah /tahun)	IPM
2021	74,44	9,18	12,85	12.598,00	75,40
2022	74,51	9,20	12,86	13.158,00	75,90
2023	74,60	9,29	12,87	14.056,00	76,71

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

merupakan proporsi atau jumlah anak usia sekolah yang berpartisipasi dalam pendidikan. APS cenderung menurun seiring dengan kenaikan jenjang usia sekolah. Pada tahun 2023 APS di Kota Pekalongan tertinggi berada pada kelompok usia 7-12 tahun sebesar 99,98%, selanjutnya APS usia 13-15 tahun sebesar 96,73%, dan APS 16-18 tahun sebesar 69,35%. APS usia sekolah dan pendidikan tinggi dari tahun 2021 sampai 2023 ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Sumber: Profil Pendidikan Kota Pekalongan 2023, BPS, 2024

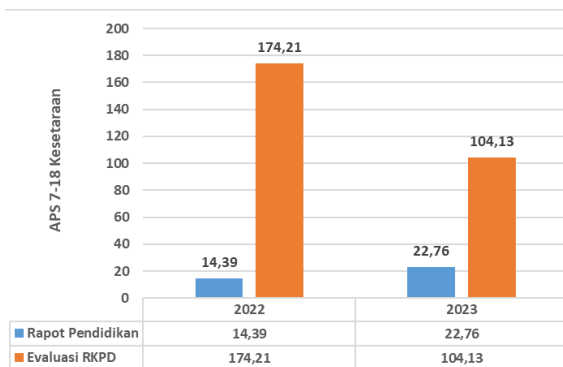
Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

APS 7-18 tahun Kesetaraan merupakan proporsi peserta didik kesetaraan usia 7-18 tahun terhadap penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah formal di suatu wilayah. Dari hasil raport pendidikan Kemendikbudristek RI diketahui bahwa APS usis 7-18 tahun Kesetaraan Kota Pekalongan pada tahun 2022 sebesar 14,39 dan meningkat menjadi sebesar 22,76 pada tahun 2023; Adapun data raport pendidikan untuk tahun 2021 belum tersedia, namun dari data LPPD diketahui capaian sebesar 5,06.

Sementara itu, berdasarkan hasil evaluasi atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Pekalongan diketahui bahwa tingkat partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome/SPM) di Kota Pekalongan sebesar 174,21% pada tahun 2022 dan menurun menjadi 104,13% pada tahun 2023. Penurunan ini disinyalir karena berkurangnya jumlah siswa di tahun 2023 pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA). Adapun capaian pada tahun 2021 sebesar 6,98 % namun dengan indikator Angka Partisipasi Kesetaraan usia 7-21 tahun.

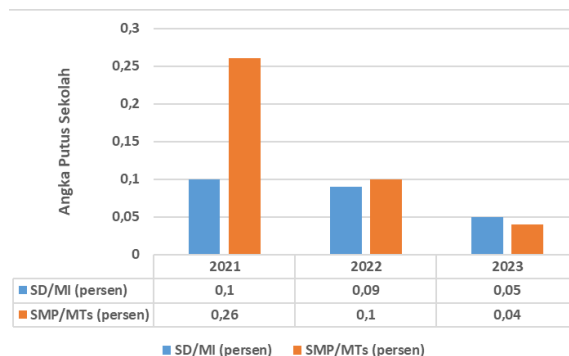
APS usia 7-18 tahun Kesetaraan Kota Pekalongan Tahun 2022 dan 2023 tersaji dalam gambar berikut ini. Terdapat perbedaan capaian APS 7-18 Kesetaraan antara data pada rapat pendidikan dan data pada evaluasi RKPD yang disebabkan karena adanya perbedaan jenis dan sumber data yang digunakan dalam perhitungan. Data pada rapat pendidikan berdasarkan data pada Dapodik Kemendikbudristek, sedangkan data pada evaluasi RKPD berdasarkan pada data siswa sekolah dan jumlah penduduk di Kota Pekalongan.



Sumber: Rapot Pendidikan Kemendikbud RI, 2024 dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan Bappeda, 2024

Gambar 3. APS 7-18 Kesetaraan Kota Pekalongan Tahun 2022 dan 2023

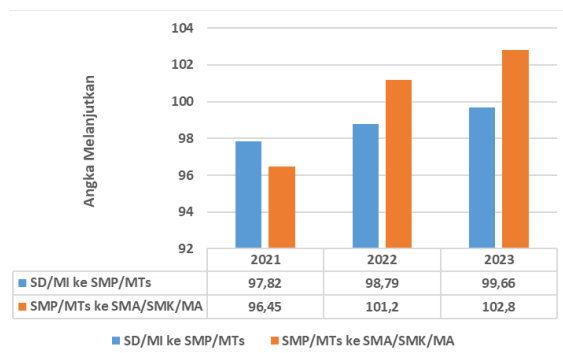
Angka Putus Sekolah dan Angka Melanjutkan pada jenjang pendidikan dasar di Kota Pekalongan menunjukkan tren yang positif. Angka putus sekolah (DO) di Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus menurun. Pada tahun 2023, angka putus sekolah pada jenjang SD/MI sebesar 0,05% dan SMP/MTs sebesar 0,04%.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam RKPD 2025

Gambar 4. Angka Putus Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

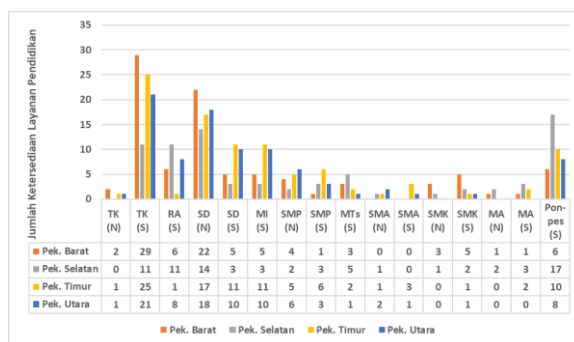
Adapun angka melanjutkan peserta didik dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs dan jenjang SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung naik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 angka melanjutkan jenjang SD/MI ke SMP/MTs sebesar 99,66% sedangkan SMP/MTs ke MA/SMK/MA sebesar 102,80 %.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam RKPD 2025

Gambar 5. Angka Melanjutkan Sekolah Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

Ketersediaan fasilitas atau layanan pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di suatu daerah. Jumlah dan distribusi ketersediaan layanan pendidikan (formal) jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan menengah di bawah ampuan Dinas Pendidikan maupun Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka Tahun 2024, BPS Kota Pekalongan, 2024

Gambar 6. Ketersediaan Layanan Pendidikan

Pada jenjang pendidikan PAUD (formal), belum seluruh kecamatan terlayani oleh TK negeri (Kecamatan Pekalongan Selatan), tetapi telah terlayani oleh TK ataupun RA swasta.

Untuk pendidikan dasar jenjang SD, di seluruh kecamatan bahkan kelurahan telah terlayani oleh SD negeri, sedangkan SD ataupun MI swasta telah melayani di seluruh kecamatan. Pada jenjang SMP, di seluruh kecamatan telah terlayani oleh SMP negeri/swasta ataupun MTs swasta.

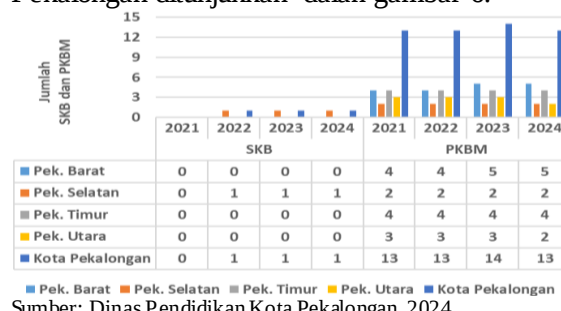
Pada jenjang pendidikan menengah, belum semua kecamatan terlayani oleh SMA negeri (Kecamatan Pekalongan Barat) ataupun SMK negeri (Kecamatan Pekalongan Timur dan Utara). Namun secara umum, semua kecamatan telah terlayani oleh SMA/SMK/MA baik negeri ataupun swasta, demikian juga dengan pondok pesantren yang telah dapat melayani seluruh kecamatan di Kota Pekalongan.

Dalam memberikan akses seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas dan anak-anak berkebutuhan khusus, beberapa satuan pendidikan (satpen) telah dapat memberikan layanan bagi penyandang disabilitas meliputi: tiga satpen pada jenjang PAUD, empat pada jenjang SD, satu pada jenjang SMP, satu pada SKB, dan satu pada PKBM.

2.2. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan Kesetaraan di Kota Pekalongan diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan dan Pusat Kegiatan Berbasis Masyarakat (PKBM) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Pekalongan. SKB didirikan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, sedangkan PKBM diselenggarakan

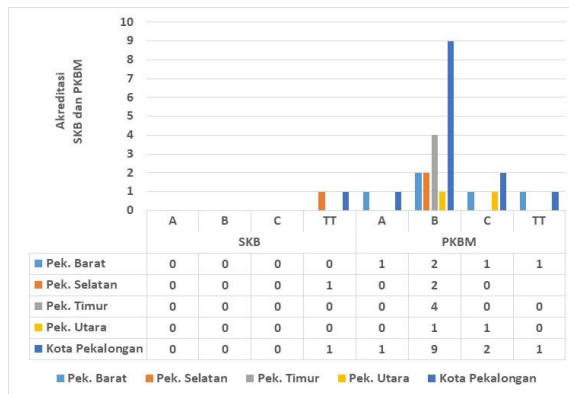
oleh masyarakat (organisasi masyarakat). Perkembangan SKB dan PKBM di Kota Pekalongan ditunjukkan dalam gambar 6.



Gambar 7. Perkembangan SKB dan PKBM Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

SKB mendapatkan izin pendirian pada tanggal 31 Januari 2022 dan di-launching pada bulan Mei 2022. Pada awal operasional di tahun ajaran 2022/2023 hingga bulan Desember 2023, SKB Kota Pekalongan menempati (meminjam) gedung SDN Keputran 4. Selanjutnya, sejak bulan Januari 2024, SKB mulai menempati gedung barunya di Jl. HOS. Cokroaminoto No. 456 Kelurahan Kuripan Yosorejo yang diresmikan gedung barunya oleh Wali Kota Pekalongan. Meski telah memiliki gedung baru, SKB ini masih membutuhkan penambahan ruang kelas baru mengingat jumlah siswa yang semakin meningkat dan terbatasnya jumlah ruang kelas. Saat ini, ruang kelas yang ada digunakan untuk dua kali pembelajaran, kelas pagi-siang untuk anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus, dan kelas siang-sore untuk Kegiatan Belajar Mangajar (KBM) pendidikan kesetaraan.

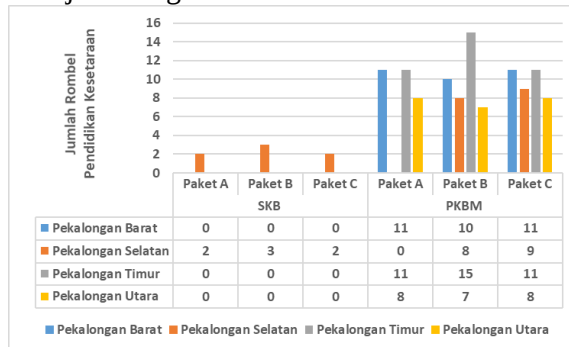
PKBM di Kota Pekalongan secara kuantitas berfluktuatif dari tahun 2021 hingga 2024. Jumlah PKBM pada tahun 2021 dan 2022 sebanyak 13, pada tahun 2023 bertambah satu sehingga menjadi 14, dan pada tahun 2024 berkurang satu sehingga saat ini terdapat 13 PKBM yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kota Pekalongan. Adapun status akreditasi terkini dari SKB ataupun PKBM disajikan dalam gambar di bawah ini. SKB masih terakreditasi TT (Tidak Terakreditasi) karena masih dalam kategori baru dan masih dalam proses pengajuan akreditasi, sedangkan untuk PKBM, 1 PKBM terakreditasi A, 9 terakreditasi B, 2 terakreditasi C, dan 1 terakreditasi TT.



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Gambar 8. Status Akreditasi SKB dan PKBM Kota Pekalongan Tahun 2024

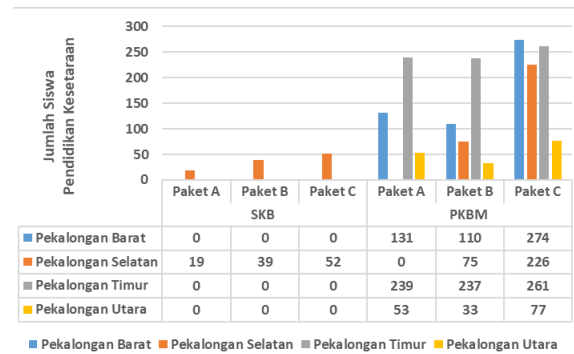
Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan terdiri dari tiga jenis layanan yaitu: Paket A untuk jenjang pendidikan SD, Paket B untuk jenjang pendidikan SMP, Paket C untuk jenjang pendidikan SMA, serta Paket untuk anak-anak inklusi atau berkebutuhan khusus). Jumlah rombongan belajar (rombel) dan siswa dari masing-masing jenis layanan di tiap kecamatan tersaji dalam gambar berikut.



Sumber: Rekap Profil Pendidikan 2023 Dinas Pendidikan, 2024

Gambar 9. Jumlah Rombel Pendidikan Kesetaraan Kota Pekalongan T.A. 2023/2024

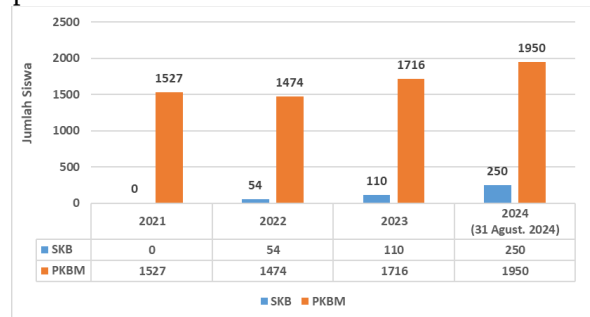
Jumlah rombel dan siswa pada SKB terdiri dari Paket A sebanyak dua rombel dan 19 siswa, Paket B terdiri dari tiga rombel dan 39 siswa, dan Paket C sebanyak dua rombel dan 52 siswa. Sedangkan pada PKBM: Paket A terdiri dari 30 rombel dan 423 siswa, Paket B 40 rombel dan 455 siswa, dan Paket C 39 rombel dan 838 siswa.



Sumber: Rekap Profil Pendidikan 2023 Dinas Pendidikan, 2024

Gambar 10. Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Kota Pekalongan T.A. 2023/2024

Jumlah siswa SKB dan PKBM meningkat dari tahun 2021 hingga bulan Agustus 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah. Peningkatan siswa kesetaraan ini menunjukkan semakin meningkatnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya yang tidak berkesempatan dalam mengenyam pendidikan formal.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Gambar 11. Jumlah Siswa Kesetaraan Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

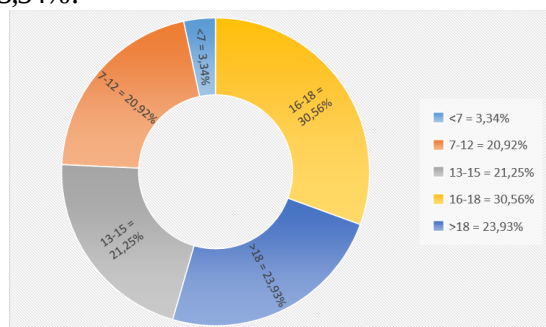
Berdasarkan jenjang usia sekolah, tidak semua siswa pendidikan kesetaraan berusia pada usia sekolah 7 sampai 18 tahun. Pada jenjang Paket A terdapat 61 siswa yang berusia kurang dari 7 tahun, sedangkan siswa yang berusia di atas 18 tahun sebanyak lima siswa pada jenjang Paket A, 85 siswa pada jenjang Paket B, dan 347 siswa pada Paket C. Jumlah siswa selengkapnya berdasarkan usia dan jenjang pendidikan kesetaraan ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Jumlah Siswa Pendidikan Kesetaraan Menurut Usia dan Jenjang Kota Pekalongan T.A. 2023/2024

Kecamatan / Kota	Usia (tahun)				
	<7	7-12	13-15	16-18	>18
Jenjang Paket A					
Pek. Barat	3	106	18	3	1
Pek. Selatan	1	17	1	0	0
Pek. Timur	32	182	14	7	4
Pek. Utara	25	27	1	0	0
Kota Pekalongan	61	332	34	10	5
Jenjang Paket B					
Pek. Barat	0	5	55	29	21
Pek. Selatan	0	7	41	45	21
Pek. Timur	0	30	108	58	41
Pek. Utara	0	3	23	5	2
Kota Pekalongan	0	45	227	137	85
Jenjang Paket C					
Pek. Barat	0	1	30	123	120
Pek. Selatan	0	0	55	136	87
Pek. Timur	0	3	32	123	103
Pek. Utara	0	1	10	29	37
Kota Pekalongan	0	5	127	411	347
Total Kota Pekalongan	61	382	388	558	437

Sumber: Profil Pendidikan 2023 Dinas Pendidikan, 2024.

Berdasarkan komposisi jenjang usia sekolah, siswa kesetaraan dengan usia 16-18 tahun merupakan peserta didik terbesar dengan prosentase sebesar 30,56 %, selanjutnya usia di atas 18 tahun sebesar 23,93 %, usia 13-15 tahun sebesar 21,25%, usia 7-12 tahun sebesar 20,92%, dan terakhir usia < 7 tahun sebesar 3,34%.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

Gambar 12. Presentase Siswa Pendidikan Kesetaraan Menurut Usia Kota Pekalongan T.A. 2023/2024

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*,

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono 2013). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan analisis; Dilakukan analisis dan penafsiran suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti (Nasution, 2023).

Studi kasus merupakan salah satu dari delapan jenis penelitian kualitatif (Moleong dalam Hasan, 2022). Penelitian ini dilakukan dalam upaya mengetahui permasalahan (faktor penyebab) Anak Tidak Sekolah di Kota Pekalongan, upaya yang telah dilakukan, serta strategi agar penanganan ATS dapat optimal. Dalam penelitian digunakan suatu pendekatan (*approach*) berupa strategi penanganan ATS yang dikembangkan oleh Bappenas ataupun Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta analisa penelitian yang mengadopsi konsep pembangunan *smart city* yang digagas oleh Kementerian Kominfo RI. Menurut Ratna dalam Prastowo (2016), pendekatan (cara mendekati obyek penelitian) dimaksudkan guna mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian.

Data penelitian berupa data kualitatif ataupun kuantitatif yang berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber pertama, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kedua, ketiga, dan seterusnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan guna memperoleh keterangan dari informan yang terkait dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan, dilakukan dengan diskusi dalam *Focus Group Discussion* baik dengan instansi pemerintah, *Non-Governmental Organization* (Organisasi Non-Pemerintah), akademisi, maupun masyarakat. Teknik dokumentasi dilakukan

guna mengumpulkan informasi atas dokumen dari instansi terkait ataupun *stakeholder* lainnya, seperti peraturan, petunjuk, dan laporan. Pengolahan (ataupun analisis) data dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir dengan metode induktif hingga tidak ada data yang dianggap baru.

Penelitian ini menggunakan analisis SWOT. Sebagai salah satu metode yang umum digunakan dalam perencanaan strategis, analisis SWOT dilakukan guna mengevaluasi atas empat aspek dalam suatu program kerja atau proyek, yaitu *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman). Analisis ini mengidentifikasi atas faktor internal dan eksternal yang mendukung maupun yang tidak mendukung dalam menanggapi ATS di Kota Pekalongan.

- *Strengths* (kekuatan) merupakan kondisi internal (Pemerintah Kota Pekalongan) yang menjadi pendorong keberhasilan dalam menangani ATS. Kekuatan berupa kepemilikan atau akses terhadap sumber daya yang diperlukan dalam penanganan ATS (sumber daya manusia berupa Relawan ATS di Kelurahan dan Tim Penanganan ATS Tingkat Kota Pekalongan, sumber daya keuangan berupa tersedianya penganggaran dalam pendataan ATS maupun intervensi ATS oleh Perangkat Daerah, dan teknologi berupa tersedianya aplikasi OPTIMIS 2023 dan TUNTAS 2024), pengalaman Pemerintah Kota dalam melakukan pendataan ATS yang dilakukan pada tahun 2022 s.d 2023, dan kebijakan yang mendukung penanganan ATS di Kota Pekalongan (RPJMD, Renstra OPD, RKPD dan Renja OPD)
- *Weaknesses* (kelemahan) sejatinya adalah hal yang tidak menjadi kekuatan, merupakan kondisi internal yang berpotensi menjadi hambatan dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan. Kelemahan berupa masih terbatasnya SDM yang berkualitas dalam penanganan ATS, terbatasnya anggaran yang disediakan dalam P-ATS, serta terbatasnya sarana-prasarana pendidikan kesetaraan.
- *Opportunities* (peluang) secara umum dapat dikenali sebagai kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan suatu

program. Peluang dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan adalah bahwa Kota Pekalongan pada tahun 2024 menjadi salah satu lokus pendampingan dalam penanganan ATS oleh Provinsi Jawa Tengah dan UNICEF Perwakilan Jawa-Bali.

- *Threats* (ancaman) adalah kondisi eksternal yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Ancaman dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan meliputi masih tingginya ATS di Kota Pekalongan, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan belum optimalnya layanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat (PKBM).

Langkah berikutnya adalah menetapkan strategi agar kekuatan (*strengths*) internal Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS mampu memanfaatkan peluang (*opportunities*) dan mengatasi ancaman (*threats*) yang berasal dari luar (seperti masyarakat dan pihak eksternal), serta strategi mengurangi kelemahan (*weaknesses*) internal pemerintah kota agar menjadi kekuatan sehingga mampu memanfaatkan peluang (*opportunities*) dan mengatasi ancaman (*threats*) dari pihak eksternal dalam menangani ATS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan telah dikeluarkan Strategi Nasional (Stranas) Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia dan petunjuk teknisnya sebagai kerangka logis dan strategis penanganan ATS, penanganan ATS dilaksanakan baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, menurut Herlinawati dan Susanto (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa: 1) Pendataan ATS terkendala atas sinkronisasi data mulai dari tingkat desa / kelurahan akibat koordinasi pendataan yang kurang lancar; 2) Faktor penyebab ATS yaitu karena ekonomi, sosial, dan geografis; dan 3) Upaya memotivasi ATS kembali ke sekolah dapat dilakukan melalui Program Indonesia Pintar.

Untuk di daerah, penanganan ATS dilaksanakan berdasarkan atas permasalahan dan kondisi masing-masing daerah. Hidayati (2023) dalam penelitiannya menyebutkan

bahwa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program P-ATS di Kabupaten Magelang. Faktor pendukung program P-ATS yaitu komitmen pemerintah dalam menangani masalah ATS, kolaborasi Tim P-ATS dari beberapa OPD lintas sektor, pendampingan pelaksanaan program oleh UNICEF dan ITB Semarang, dan ketersediaan data ATS yang valid; Sedangkan faktor penghambatnya yaitu mindset sasaran program yang kurang mementingkan pendidikan, anggaran pelaksanaan program yang terbatas, dan jumlah PKBM dan sekolah inklusi yang belum merata. Di Kabupaten Sragen, dari penelitian yang dilakukan Noviani, dkk (2023), diketahui bahwa faktor penyebab ATS di Kabupaten Sragen antara lain karena motivasi kurang sebesar, kemampuan ekonomi kurang, sudah bekerja atau ingin bekerja, dan disabilitas; Strategi dalam menangani ATS dilakukan melalui strategi pencegahan (memantau anak yang rentan atau memiliki resiko putus sekolah) dan strategi intervensi yang bertujuan untuk mengembalikan dan mendampingi ATS ke sekolah atau pelatihan yang sesuai. Strategi intervensi bersifat multisektoral (diperlukan kerjasama dan komitmen dari Organisasi Perangkat Daerah), dilakukan melalui gerakan kembali ke sekolah, pelatihan life skills sesuai kebutuhannya, pendirian rumah singgah bagi ATS, pemberian konsultasi kepada ATS untuk mendorong minat atau motivasi agar mau kembali sekolah. Berikutnya adalah strategi penanganan ATS yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Andayani, dkk (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa BAPPEDA sebagai koordinator, mengkoordinir Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan penanganan anak putus sekolah dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama petugas Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dalam pelaksanaan pendataan ATS. Pendekatan persuasif dari petugas lapangan, membuat anak ATS yang berhasil didata bersedia untuk kembali belajar baik melalui jalur formal (sekolah) maupun melalui lembaga-lembaga nonformal seperti SKB,

PKBM, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).

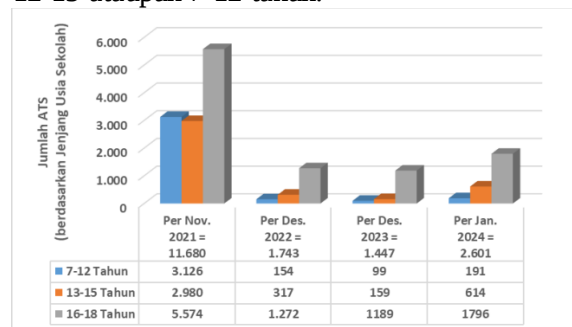
4.1. Penanganan ATS di Kota Pekalongan

Penanganan ATS di Kota Pekalongan telah dilakukan mulai dari Penyiapan Tim Penanganan ATS, Pendataan ATS, Penyusunan Rencana Aksi Daerah, dan Pengembalian ATS ke sekolah dengan pelibatan atau intervensi Perangkat Daerah dan stakeholder terkait. Namun demikian, optimalisasi penanganan ATS perlu dilakukan agar target pengembalian ATS ke sekolah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

4.1.1. Anak Tidak Sekolah (ATS)

ATS, dalam Stranas Penanganan Anak Tidak Sekolah BAPPENAS RI, didefinisikan sebagai anak usia sekolah (7-18) tahun yang: 1) Tidak pernah bersekolah (BPB/Belum Pernah Bersekolah); 2) Putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (DO/Drop Out), dan 3) Putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (LTM/Lulus Tidak Melanjutkan).

Data ATS Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan awal tahun 2024 ditunjukkan oleh Gambar 13. Berdasarkan jenjang usia sekolah, semakin tinggi jenjang usia sekolah, maka semakin besar jumlah ATS. Jumlah ATS pada jenjang usia 16-18 tahun lebih banyak dari jumlah ATS pada jenjang usia 12-15 ataupun 7-12 tahun.



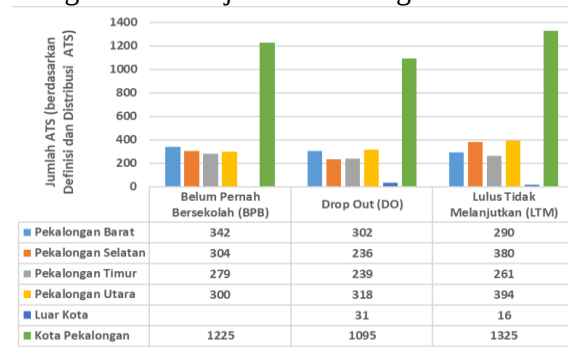
Sumber: OPTIMIS Bappeda, 2023 dan TUNTAS, 2024

Gambar 13. Jumlah ATS (berdasarkan Jenjang Usia Sekolah) Tahun 2021-2024

Pada Desember tahun 2021 Pemerintah Kota Pekalongan mendapati data terduga ATS dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek dan data *Education Management Information System* (EMIS) Kemenag sebanyak 11.680 ATS. Data terduga

ATS ini kemudian dipadupadankan dengan data kependudukan per November 2021 yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan verifikasi dan validasi oleh kader kelurahan sehingga diperoleh data ATS terverifikasi dan tervalidasi per Desember 2022 sebanyak 1.743 ATS. Pada Desember tahun 2023, jumlah ATS tercatat 1.447 anak. Data berkurang setelah dilakukan upaya pendekatan berupa sosialisasi kepada ATS/orang tua ATS yang dilaksanakan oleh pihak kelurahan serta upaya pengembalian ATS ke lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan (SKB dan PKBM).

Pada awal tahun 2024, Pemerintah Kota Pekalongan kembali mendapati data ATS LTM/DO Dapodik Pusdatin Kemendikbudristek RI sebesar 1.739 ATS. Angka ini selanjutnya digabungkan dengan data ATS OPTIMIS BAPPEDA per Januari 2024 sebanyak 862 ATS sehingga diperoleh ATS sebesar 2.601. Data ATS inilah yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh relawan kelurahan pada tahun 2024. Sementara itu, data dalam Dapodik Pusdatin Kemendikbudristek RI senantiasa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Per tanggal 27 Mei 2024, tercatat ada 3.645 ATS LTM/DO/BPB terdiri atas 1.225 ATS BPB, 1.095 ATS DO, dan 1.325 ATS LTM, dengan rincian dan distribusi sebagaimana ditunjukkan dalam gambar.



Sumber: Dapodik LTM DO BPB Kemendikbud RI, Mei 2024

Gambar 14. Jumlah dan Distribusi ATS berdasarkan Definisi ATS Kota Pekalongan Tahun 2024

4.1.2. Strategi Penanganan ATS

Dalam Stranas Penanganan ATS di Indonesia disebutkan bahwa strategi penanganan ATS dilakukan melalui dua

pendekatan, yaitu strategi intervensi dan strategi pencegahan. Strategi intervensi ditujukan kepada anak usia sekolah yang tidak bersekolah (ATS/Anak Tidak Sekolah), sedangkan strategi pencegahan diarahkan untuk memastikan agar anak yang berisiko putus sekolah (ABPS/Anak Berisiko Putus Sekolah) tetap dapat bersekolah hingga selesai 12 tahun.

Berdasarkan faktor penyebab, terdapat empat penyebab yang saling berhubungan terkait penanganan ATS, yaitu: 1) Kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan pelatihan; 2) Kurangnya relevansi serta mutu layanan pendidikan dan pelatihan yang ada; 3) Hambatan ekonomi dan efek kemiskinan; dan 4) Hambatan yang berakar pada faktor sosial budaya dan persepsi negatif terhadap pentingnya pendidikan.

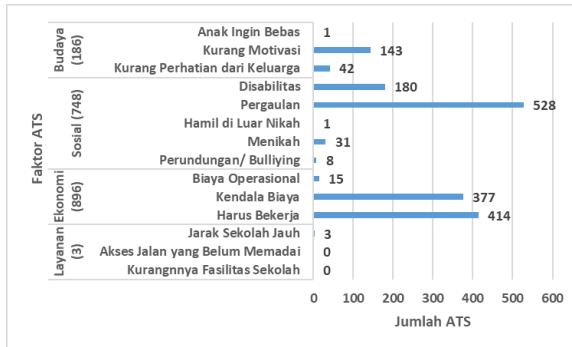


Sumber: Stranas Penanganan ATS di Indonesia, Bappenas, 2020

Gambar 15. Kerangka Strategi Penanganan ATS berdasarkan Strategi, Kelompok Sasaran ATS, dan Faktor Penyebab

Dalam strategi intervensi ATS, berdasarkan sasaran kelompok ATS, dibedakan menjadi tujuh sasaran kelompok ATS, yaitu: 1) Anak yang berada di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar); 2) Anak yang Bekerja/Pekerja Anak; 3) Anak Penyandang Disabilitas; 4) Anak Berhadapan dengan Hukum; 5) Anak Jalanan dan Anak Terlantar; dan 7) Anak dalam Pernikahan Anak dan Ibu Remaja.

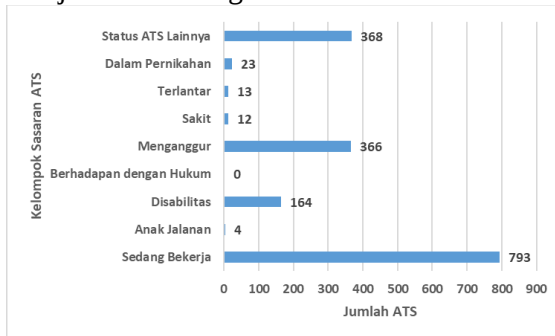
Dari hasil verifikasi dan validasi data ATS yang dilaksanakan pada tahun 2022, dengan menggunakan instrumen kuesioner dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa berdasarkan faktor penyebab, ATS di Kota Pekalongan tertinggi disebabkan karena faktor ekonomi sebanyak 896 anak, selanjutnya faktor sosial 743 anak, faktor budaya 186 anak, dan faktor layanan 3 anak; Sedangkan untuk faktor mutu tidak dilakukan penghitungan, Jumlah ATS berdasarkan faktor penyebab tersaji dalam gambar berikut ini.



Sumber: Hasil Verval ATSKota Pekalongan Tahun 2022

Gambar 16. ATS berdasarkan Faktor Penyebab

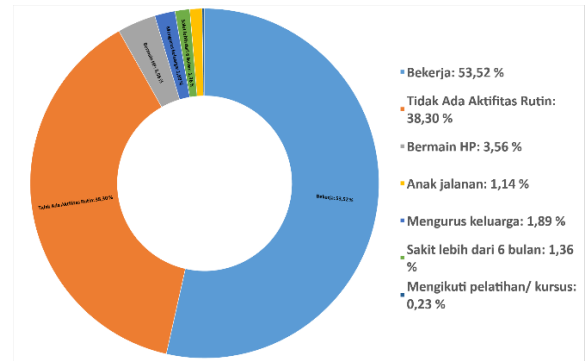
Sementara itu berdasarkan sasaran, ATS di Kota Pekalongan sebagian besar berasal dari kelompok anak bekerja sebanyak 793 ATS, Status ATS lainnya 368 ATS, menganggur 366 ATS, dan disabilitas 164 ATS sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: Hasil Verval ATSKota Pekalongan Tahun 2022

Gambar 17. ATS berdasarkan Kelompok Sasaran

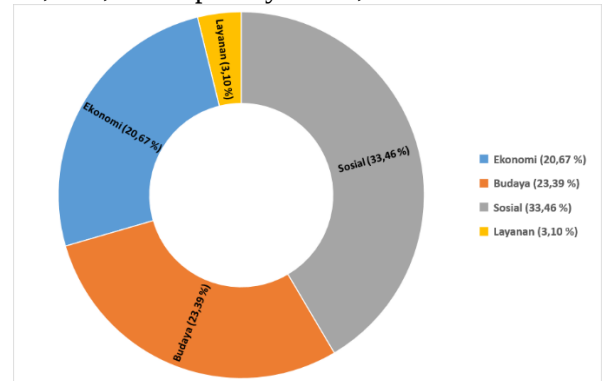
Selanjutnya, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data ATS LTM/DO Dapodik tahun 2024 per 31 Agustus 2024 diperoleh hasil lima aktivitas terbanyak ATS yaitu sebagai berikut: 53,52% ATS beraktivitas sebagai pekerja, 38,30% tidak ada aktivitas rutin, 3,56% bermain HP, 1,89% mengurus keluarga, dan 1,14% anak jalanan, dengan grafik sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut ini.



Sumber: Aplikasi Tuntas per 31 Agustus 2024

Gambar 18. ATS berdasarkan Aktifitas

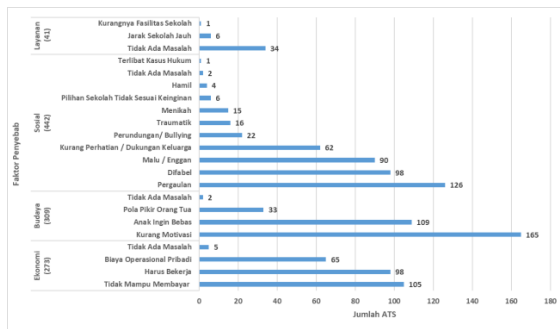
Dari hasil verifikasi dan validasi lapangan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan aspek penyebab ATS, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah ini. Aspek sosial merupakan aspek paling dominan dengan prosentase sebanyak 33,46%, disusul aspek budaya sebesar 23,39%, aspek ekonomi 20,67%, dan aspek layanan 3,10%.



Sumber: Aplikasi Tuntas per 31 Agustus 2024

Gambar 19. ATS berdasarkan Aspek Penyebab

Rincian atas aspek penyebab ATS di Kota Pekalongan ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Kurang motivasi (aspek budaya) menjadi urutan pertama sebanyak 165 ATS, pergaulan (aspek sosial) mejadi urutan kedua sebanyak 126 ATS, selanjutnya anak ingin bebas (aspek budaya) sebanyak 109 ATS, dan tidak mampu membayar (aspek ekonomi) sebanyak 105 ATS.



Sumber: Aplikasi Tuntas per 31 Agustus 2024

Gambar 20. Rincian atas Aspek Penyebab ATS

4.1.3. Tahapan Penanganan ATS

Dalam Panduan Teknis Strategi Penanganan ATS di Jawa Tengah (Bappeda Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF, 2023) disebutkan bahwa strategi penanganan ATS tidak dapat berjalan secara optimal tanpa didukung SDM dan kelembagaan yang memadai. Implementasi strategi penanganan ATS dimulai dari tahap Persiapan (pembentukan tim P-ATS), Pendataan (pelatihan dan pendataan ATS), Perencanaan (penyusunan RAD), dan Pengembalian ATS ke sekolah (rekonfirmasi, pengembalian dan pendampingan ATS yg sudah bersekolah), dengan skema pentahapan sebagai berikut.



Sumber: Arah Kebijakan dan Juknis Penanganan ATS di Jawa Tengah, Bappeda Prov. Jateng, 2023

Gambar 21. Alur Penanganan ATS

Persiapan (Pembentukan Tim P-ATS)

Penanganan ATS membutuhkan struktur koordinasi, pengaturan keterlibatan, dan peran tim teknis yang bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing. Tim P-ATS Kota Pekalongan telah dibentuk pada tanggal 27 Februari 2024 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 000.7.3/0137 Tahun 2024 tentang Tim

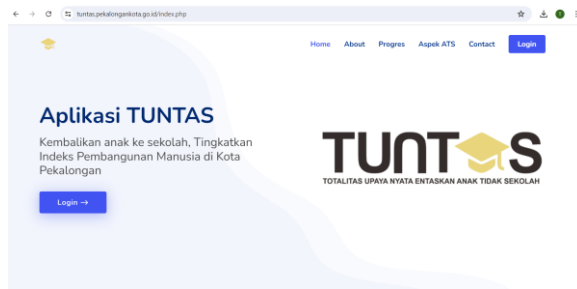
Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) Kota Pekalongan Tahun 2024. Tim P-ATS ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, dan Sekretariat P-ATS Kota Pekalongan.

Guna menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS, Pemerintah Kota Pekalongan telah menyampaikan komitmen berupa dukungan pendanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam pengentasan ATS. Pernyataan komitmen juga disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan beserta perangkat daerah terkait dan *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan.

Pendataan (Pelatihan dan Pendataan ATS)

Pelatihan atau bimbingan teknis diberikan kepada kader atau relawan ATS dari seluruh kelurahan se-Kota Pekalongan. Pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kader terkait apa itu ATS, faktor penyebab ATS, bagaimana menggali informasi atas ATS, instrumen dalam pendataan ATS, serta bagaimana melakukan pengisian atas instrumen ATS tersebut.

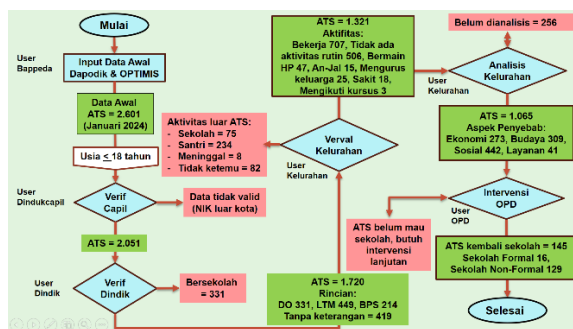
Setelah dilakukan pelatihan, selanjutnya adalah pendataan ATS yang dilaksanakan oleh kader atau relawan ATS ke setiap ATS *by name by address*. Pendataan dimaksudkan guna memverifikasi dan memvalidasi data ATS yang bersumber dari Dapodik LTM/DO tentang keberadaan ATS, aktivitas sehari-hari yang dilakukan ATS, serta penyebab ATS. Guna memudahkan dalam proses pendataan, pada tahun 2022 telah digunakan Aplikasi Otomasi Pelayanan Terpadu dan Sistematis (OPTIMIS) yang digagas oleh Bappeda Kota Pekalongan. Aplikasi ini kemudian dikembangkan pada tahun 2024 menjadi Aplikasi TUNTAS (Totalitas Upaya Nyata Entaskan Anak Tidak Sekolah) di Kota Pekalongan dengan alamat <https://tuntas.pekalongankota.go.id/index.php>.



Sumber: Laman Aplikasi TUNTAS Kota Pekalongan, 2024

Gambar 22. Laman Aplikasi TUNTAS

Adapun alur pendataan ATS secara lengkap ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Sumber: Aplikasi TUNTAS, 2024, diolah

Gambar 23. Alur Pendataan ATS

Pada tahap awal, Bappeda menentukan ATS Kota Pekalongan berdasarkan data yang terdapat dalam OPTIMIS dan Dapodik Kemendikbud-ristek RI. Selanjutnya, Dindikcapil melakukan verifikasi data tersebut berdasarkan NIK ATS. Data dengan NIK yang tidak valid ataupun ATS dengan usia di atas 18 tahun tidak digunakan, sedangkan data yang valid selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pendidikan untuk dilakukan identifikasi atas status ATS apakah aktif bersekolah ataukah berstatus ATS (DO, LTM, dan BPB). Anak dengan status ATS kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh kelurahan (kader) berdasarkan aktivitas sehari-hari ATS, faktor penyebab, dan intervensi OPD yang sesuai atas kondisi ATS. Selanjutnya, OPD melakukan konfirmasi kepada ATS apakah ATS akan kembali ke sekolah ataukah belum mau ke sekolah. Intervensi dilakukan kepada ATS yang mau kembali ke sekolah.

Perencanaan (Penyusunan Rencana Aksi Daerah)

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD P-

ATS) bertujuan untuk memastikan agar setiap anak di Kota Pekalongan memperoleh layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kehidupan mereka. RAD P-ATS diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam upaya menangani ATS dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kota Pekalongan.

RAD P-ATS sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan ATS di Kota Pekalongan disusun oleh Pokja Penyusunan RAD P-ATS dari berbagai OPD terkait. Secara garis besar, RAD P-ATS berisikan latar belakang pentingnya penanganan ATS, analisa situasi atas kondisi ATS di Kota Pekalongan, Kebijakan dan strategi dalam menangani ATS, serta matriks atas rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilakukan oleh perangkat Daerah/ Pemprov Jateng/ Kemendikbud/ Kemenag/ Lembaga Non-Pemerintah dalam menangani ATS dalam kurun waktu tahun 2024-2026. RAD P-ATS Kota Pekalongan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 31A Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah (RAD P-ATS) Kota Pekalongan Tahun 2024-2026 pada tanggal 13 Agustus 2024.

Pengembalian ATS ke Sekolah

Pengembalian ATS ke sekolah dilakukan dengan tahapan rekonfirmasi, pengembalian ke sekolah, dan pendampingan ATS yang sudah ke sekolah. Rekonfirmasi dilaksanakan guna memastikan apakah ATS akan kembali ke sekolah atau tidak. Rekonfirmasi dilaksanakan oleh berbagai pihak, yaitu kelurahan, SKB dan PKBM terdekat ATS, serta OPD pengampu berdasarkan aspek penyebab ataupun aktivitas. ATS yang mau kembali sekolah, dikembalikan ke SKB, PKBM, ataupun sekolah formal untuk mendapatkan layanan pendidikan kembali. Adapun pendampingan ATS yang sudah kembali ke sekolah dimaksudkan agar ATS tersebut nantinya tidak kembali menjadi ATS lagi hingga menyelesaikan pendidikan yang diharapkan.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Pekalongan ditargetkan agar dapat mengembalikan 200 (dua ratus) ATS untuk kembali ke sekolah. Terhitung per tanggal 31

Agustus 2024 tercatat sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) ATS telah kembali ke sekolah, baik sekolah formal maupun non-formal. Jumlah ATS yang kembali ke sekolah formal (SD/MI/SLB, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA) sebanyak 16 ATS, terdiri dari 10 ATS laki-laki dan 6 ATS perempuan; Sedangkan Jumlah ATS yang kembali ke sekolah non-formal (SKB dan PKBM) sebanyak 129 ATS, terdiri dari 80 ATS laki-laki dan 49 ATS perempuan. Target dan realisasi ATS yang telah kembali ke sekolah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Target dan Realisasi ATS yang Kembali ke Sekolah

No.	Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
1.	2024	200	145	Belum tercapai
2.	2025	200	-	-
3.	2026	200	-	-

Sumber: TUNTAS, 2024

Dalam penanganan ATS agar kembali ke sekolah diperlukan intervensi dari perangkat daerah sesuai kewenangan yang diampu, baik yang dilakukan langsung kepada ATS, orang tua ATS, keluarga ATS, ataupun masyarakat. Peran ataupun intervensi yang dapat diberikan perangkat daerah, lembaga ataupun masyarakat dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan tersaji dalam tabel berikut ini

Tabel 6. Intervensi Perangkat Daerah dalam P-ATS

No.	Perangkat Daerah dan/atau Stakeholder
1.	Dinas Pendidikan: - Penyediaan Layanan Konsultasi Pendidikan (lakondik) dalam upaya pendirian Unit Layanan Disabilitas (ULD) bagi anak-anak inklusif dan disabilitas; - Penjaminan akses pendidikan untuk ATS dengan kondisi tertentu; - Persebaran SKB ataupun PKBM agar lebih mudah dijangkau; - Pembelajaran non-formal di luar jam kerja; dan - Penyediaan pendidikan program vokasi.
2.	DPMPPA dan atau kecamatan/kelurahan: - Advokasi/pendampingan/ penanganan / konseling/ penyuluhan kepada ATS, orangtua ATS, keluarga ATS, ataupun masyarakat.
3.	BPKAD/Bagian Kesra/BAZNAS/CSR:

- Pemberian beasiswa, bantuan sosial, dan/atau hibah bagi ATS/keluarga ATS.
- 4. Dinsos P2KB:
 - Pemberian bantuan sosial (PKH, dlsb) ataupun alat bantu bagi penyandang disabilitas.
 - Penanganan dan rehabilitasi sosial bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- 5. Dinas Kesehatan:
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dalam upaya pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC),
 - Pemberian layanan kesehatan, baik pencegahan (edukasi), pengobatan, ataupun penanganan kasus trauma fisik.
- 6. Dinerinaker / Dindagkop UKM
 - Pelatihan bagi orang tua ATS ataupun ATS dengan usia di atas 18 tahun.
- 7. DPUPR/Dinas Perhubungan:
 - Peningkatan akses jalan dan penyediaan moda transportasi bagi ATS.

Sumber: Hasil FGD, 2024

4.2. Hasil Analisis SWOT

Berikut adalah hasil identifikasi SWOT dalam penelitian strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan:

Tabel 7. Identifikasi SWOT dalam P-ATS

S (Strengths = Kekuatan)	
1.	Urusan bidang pendidikan termuat dalam Visi Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.
2.	Adanya komitmen dan kebijakan daerah dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan.
3.	Adanya dukungan anggaran dalam pendataan ATS dan anggaran OPD yang mendukung penanganan ATS.
4.	Tersedianya aplikasi TUNTAS dan pengalaman pendataan ATS yang pernah dilakukan pada tahun 2022 dan 2024.
5.	Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan (SKB) di Kecamatan Pekalongan Selatan dan layanan pendidikan formal yang cukup memadai.
W (Weaknesses = Kelemahan)	
1.	Belum optimalnya penanganan ATS di Kota Pekalongan (target pengembalian ATS ke sekolah yang belum tercapai).
2.	Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam Penanganan ATS.
3.	Terbatasnya anggaran dalam penanganan ATS.
4.	Terbatasnya SDM dan sarana prasarana penyedia layanan kesetaraan yang disediakan

-
- oleh Pemkot Pekalongan (SKB).
5. Beragamnya jenis data dalam pembangunan daerah (khususnya bidang pendidikan).
-

W (Weaknesses = Peluang)

1. Kota Pekalongan menjadi salah satu lokus upaya penanganan ATS yang disertai dengan pendampingan dan dukungan anggaran oleh Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan Jawa - Bali.
 2. Tersedianya data ATS LTM/DO/BPB yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek RI.
 3. Adanya pedoman terkait penanganan ATS baik dari pemerintah pusat maupun provinsi (Stranas Penanganan ATS di Indonesia serta Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan ATS di Jawa Tengah).
 4. Adanya partisipasi dari masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan pendidikan kesetaraan (terdapatnya 13 PKBM di Kota Pekalongan).
 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) kesetaraan 7-18 tahun dalam rapot pendidikan yang menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi Pemerintah Daerah.
-

T (Threats = Ancaman)

1. Masih tingginya ATS di Kota Pekalongan utamanya pada jenjang pendidikan menengah.
2. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi sebagai faktor penyebab utama ATS di Kota Pekalongan dengan kelompok sasaran ATS antara lain sebagai sebagai pekerja anak, tidak ada aktivitas rutin, dan anak bermain HP.
3. Data ATS bersifat dinamis dan jumlahnya berfluktuatif dari waktu ke waktu.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (orang tua, keluarga, dan lingkungan ATS) akan pentingnya pendidikan.
5. Belum optimalnya pelayanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat (kualitas, manajemen pengelolaan, ataupun sarana-prasarana).

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Selanjutnya adalah strategi agar kekuatan (*strengths*) ataupun kelemahan (*weaknesses*) mampu memanfaatkan peluang (*opportunities*) dan mengatasi ancaman (*threats*).

Tabel 8. Analisis SWOT dalam Strategi Penanganan ATS di Kota Pekalongan

Faktor Internal (S dan W) Faktor Eksternal (O dan T)	Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
	1. Urusan bidang pendidikan termuat dalam Visi Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. 2. Adanya komitmen dan kebijakan daerah dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan. 3. Adanya dukungan anggaran dalam pendataan ATS dan anggaran OPD yang mendukung penanganan ATS. 4. Tersedianya aplikasi TUNTAS dan pengalaman pendataan ATS yang pernah dilakukan pada tahun 2022 dan 2024. 5. Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan (SKB) di Kecamatan Pekalongan Selatan dan layanan pendidikan formal yang cukup memadai.	1. Belum optimalnya penanganan ATS di Kota Pekalongan (target pengembalian ATS ke sekolah yang belum tercapai). 2. Terbatasnya SDM yang berkualitas dalam Penanganan ATS. 3. Terbatasnya anggaran dalam penanganan ATS. 4. Terbatasnya SDM dan sarana prasarana penyedia layanan kesetaraan yang disediakan oleh Pemkot Pekalongan (SKB). 5. Beragamnya jenis data dalam pembangunan daerah (khususnya bidang pendidikan).
Opportunity (Peluang)	Strategi Kekuatan dan Peluang	Strategi Kelemahan dan Peluang
1. Kota Pekalongan menjadi salah satu lokus upaya Penanganan ATS yang disertai dengan pendampingan dan dukungan anggaran oleh Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF Perwakilan Jawa - Bali. 2. Tersedianya data ATS LTM/DO/BPB yang dikembangkan oleh Pusdatin Kemendikbudristek RI. 3. Adanya pedoman terkait Penanganan ATS baik dari pemerintah pusat maupun provinsi (Stranas Penanganan ATS di Indonesia serta Arah Kebijakan dan Strategi Penanganan ATS di Jawa Tengah). 4. Adanya partisipasi dari masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam penyeleenggaraan layanan pendidikan kesetaraan (terdapatnya 13 PKBM di Kota Pekalongan). 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) kesetaraan 7-18 tahun dalam rapat	1. Optimalisasi komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS dengan mempedomani strategi nasional ataupun arah kebijakan dan strategi penanganan ATS di Jawa Tengah. 2. Integrasi dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS dan target capaian partisipasi pendidikan kesetaraan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. 3. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat / provinsi, UNICEF, ataupun lembaga lainnya sebagai salah satu lokus dalam upaya penanganan ATS. 4. Integrasi pendataan ATS dalam aplikasi TUNTAS ke dalam Dapodik LTM/ DO/ BPB Pusdatin Kemendikbudristek RI (adanya sinergitas data antar aplikasi yang dibangun). 5. Pengembangan penyajian data ATS yang dapat diakses dengan <i>cut off</i> waktu tertentu, <i>report</i> (laporan) jumlah ATS yang mendapat pelayanan, serta fasilitas fitur rekam jejak ATS meliputi: identitas, alamat, penyebab, intervensi, dan status ATS. 6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam upaya	1. Optimalisasi peran Tim Penanganan ATS Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mendorong terbentuknya Tim Penanganan ATS di tingkat kelurahan ataupun kecamatan. 2. Optimalisasi implementasi pelaksanaan penanganan ATS dengan mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penanganan ATS (kesejahteraan remaja) di Kota Pekalongan. 3. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dalam menangani ATS dengan melibatkan <i>stakeholder</i> terkait. 4. Alternatif sumber pendanaan selain dari APBD Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan penanganan ATS, seperti dari BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional) dan TJSLBU (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan Usaha). 5. Penyamaan persepsi dalam menentukan data dasar yang digunakan dalam penetapan/ penghitungan suatu indikator sehingga tidak beragamnya versi data. 6. Peningkatan kerja sama dengan Kemenag Kota Pekalongan dalam penanganan ATS,

pendidikan yang menjadi salah satu indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) bagi pemerintah daerah.	menangani ATS. 7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan berbasis masyarakat (PKBM) serta pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan (SKB) dengan pelatihan dan keterampilan.	utamanya dalam penyediaan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) yang diselenggarakan oleh masyarakat (kelompok masyarakat / yayasan). 7. Peningkatan peran serta dan keterlibatan stake holder terkait (pelaku usaha, akademisi) dalam penanganan ATS.
Threats (Ancaman)	Strategi Kekuatan dan Ancaman	Strategi Kelemahan dan Ancaman
1. Masih tingginya ATS di Kota Pekalongan utamanya pada jenjang pendidikan menengah. 2. Faktor sosial, budaya, dan ekonomi sebagai faktor penyebab utama ATS di Kota Pekalongan, dengan kelompok sasaran ATS antara lain sebagai pekerja anak, tidak ada aktivitas rutin, dan anak bermain HP. 3. Data ATS bersifat dinamis dan jumlahnya berfluktuatif dari waktu ke waktu. 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat (orang tua, keluarga, dan lingkungan ATS) akan pentingnya pendidikan. 5. Belum optimalnya pelayanan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat (kualitas, manajemen pengelolaan, ataupun sarana-prasarana).	1. Perluasan akses layanan pendidikan kesetaraan, utamanya pada jenjang pendidikan menengah (Paket C). 2. Prioritas penanganan ATS berdasarkan faktor penyebab ataupun sasaran kelompok ATS. 3. Pengembangan aplikasi TUNTAS dari tahap pendataan (verifikasi dan validasi), rekonfirmasi, hingga pengembalian ATS ke sekolah ataupun penanganan ATS oleh perangkat daerah. Demikian juga pengembangan terhadap user (pengguna) yang dapat mengakses, mengeksekusi, ataupun memanfaatkan aplikasi. 4. Pemutakhiran data ATS secara berkala mengingat data ATS bersifat dinamis dan jumlahnya berfluktuatif dari waktu ke waktu. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat (pendekatan personel, advokasi, ataupun kampanye publik) akan pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM. 6. Pembinaan dan Peningkatan kapasitas kepada lembaga penyelenggaraan pendidikan kesetaraan berbasis masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan. 7. Peningkatan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Cabang Dinas Pendidikan XIII) selaku pengampu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Kota Pekalongan).	1. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi kepada calon peserta didik dari keluarga tidak mampu, berkebutuhan khusus, ataupun lulusan tahun sebelumnya pada sekolah formal di bawah ampuan Dinas Pendidikan maupun Kemenag RI. 2. Kebijakan larangan mengeluarkan peserta didik dari sekolah dan menarik sesegera mungkin Anak Putus Sekolah untuk kembali sekolah. 3. Kebijakan larangan menolak ATS yang hendak kembali ke sekolah, khususnya yang akan melanjutkan ke SKB / PKBM. 4. Kebijakan kualifikasi pendidikan (dasar dan menengah) sebagai salah satu persyaratan dalam pekerjaan formal, selain keahlian/keterampilan teknis dan <i>soft skills</i>. 5. Pelindungan atas anak yang bekerja dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah. 6. Perluasan akses SKB dengan melakukan penambahan gedung (ruang kelas baru) ataupun alternatif dengan memanfaatkan ruang atau gedung fasilitas umum yang dimiliki Pemkot Pekalongan. 7. Optimalisasi pemberian bantuan pendidikan kepada ATS dan Anak Beresiko Putus Sekolah (ABPS).

Sumber: Analisis Penulis, 2024

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dihasilkan, selanjutnya dilakukan pengelompokan atas strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan ke dalam beberapa kuadran. Mendasari atas rencana aksi dalam pembangunan kota cerdas (*smart city*) yang

meliputi pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan aplikasi, dan penguatan literasi, maka strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

1. Strategi penguatan dan pengembangan kebijakan dan regulasi daerah dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan, meliputi:
 - a. Optimalisasi komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS dengan mempedomani strategi nasional ataupun arah kebijakan dan strategi penanganan ATS di Jawa Tengah.
 - b. Optimalisasi implementasi pelaksanaan penanganan ATS dengan mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) penanganan ATS (kesejahteraan remaja) di Kota Pekalongan.
 - c. Integrasi dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan ATS dan target capaian partisipasi pendidikan kesetaraan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
 - d. Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui jalur afirmasi kepada calon peserta didik dari keluarga tidak mampu, berkebutuhan khusus, ataupun lulusan tahun sebelumnya pada sekolah formal di bawah ampunan Dinas Pendidikan maupun Kemenag RI.
 - e. Kebijakan larangan mengeluarkan peserta didik dari sekolah dan menarik sesegera mungkin Anak Putus Sekolah untuk kembali sekolah.
 - f. Kebijakan larangan menolak ATS yang hendak kembali ke sekolah, khususnya yang akan melanjutkan ke SKB/PKBM.
 - g. Kebijakan kualifikasi pendidikan (dasar dan menengah) sebagai salah satu persyaratan dalam pekerjaan formal, selain keahlian/keterampilan teknis dan *soft skills*.
2. Strategi penguatan dan pengembangan kelembagaan atau organisasi dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan, meliputi:
 - a. Optimalisasi peran Tim Penanganan ATS Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mendorong terbentuknya Tim Penanganan ATS di tingkat kelurahan ataupun kecamatan.
 - b. Peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah pusat/provinsi, UNICEF, ataupun lembaga lainnya sebagai salah satu lokus dalam upaya penanganan ATS.
 - c. Peningkatan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (Cabang Dinas Pendidikan XIII) selaku pengampu penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan khusus di Kota Pekalongan.
 - d. Peningkatan kerja sama dengan Kemenag Kota Pekalongan dalam penanganan ATS, utamanya dalam penyediaan PKPPS (Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah) yang diselenggarakan oleh masyarakat (kelompok masyarakat/yayasan).
 - e. Peningkatan peran serta dan keterlibatan stake holder terkait (pelaku usaha, akademisi) dalam penanganan ATS.
 - f. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam upaya menangani ATS.
 - g. Alternatif sumber pendanaan selain dari APBD Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan penanganan ATS, seperti dari BAZNAS (Badan Amal Zakat Nasional) dan TJSLBU (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan Usaha).
3. Strategi penguatan dalam pendataan dan pengembangan aplikasi penanganan ATS, meliputi:
 - a. Penyamaan persepsi dalam menentukan data dasar yang digunakan dalam penetapan/penghitungan suatu indikator sehingga tidak beragamnya versi data.
 - b. Pemutakhiran data ATS secara berkala mengingat data ATS bersifat dinamis dan jumlahnya berfluktuatif dari waktu ke waktu.
 - c. Pengembangan aplikasi TUNTAS dari tahap pendataan (verifikasi dan validasi), rekonfirmasi, hingga pengembalian ATS ke sekolah ataupun penanganan ATS oleh perangkat

- daerah. Demikian juga pengembangan terhadap *user* (pengguna) yang dapat mengakses, mengeksekusi, ataupun memanfaatkan aplikasi.
- d. Pengembangan penyajian data ATS yang dapat diakses dengan *cut off* waktu tertentu, *report* (laporan) jumlah ATS yang mendapat pelayanan, serta fasilitas fitur rekam jejak ATS meliputi: identitas, alamat, penyebab, intervensi, dan status ATS.
 - e. Integrasi pendataan ATS dalam aplikasi TUNTAS ke dalam Dapodik LTM/DO/ BPB Pusdatin Kemendikbudristek RI (adanya sinergitas data antar aplikasi yang dibangun).
4. Strategi peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, meliputi:
 - a. Prioritas penanganan ATS berdasarkan faktor penyebab ataupun sasaran kelompok ATS.
 - b. Optimalisasi pemberian bantuan pendidikan kepada ATS dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS).
 - c. Perluasan akses layanan pendidikan kesetaraan, utamanya pada jenjang pendidikan menengah (Paket C).
 - d. Perluasan akses SKB dengan melakukan penambahan gedung (ruang kelas baru) ataupun alternatif dengan memanfaatkan ruang atau gedung fasilitas umum yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan.
 - e. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan Kesetaraan Berbasis Masyarakat (PKBM) serta pengembangan pelayanan pendidikan kesetaraan (SKB) dengan pelatihan dan keterampilan.
 - f. Pelindungan atas anak yang bekerja dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah.
 5. Strategi penguatan literasi dan kapasitas masyarakat dan aparat yang meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas SDM pemerintah dalam menangani ATS dengan melibatkan *stakeholder* terkait.
 - b. Pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada lembaga penyelenggaraan

pendidikan kesetaraan berbasis masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan.

- c. Peningkatan kesadaran masyarakat (pendekatan personel, advokasi, ataupun kampanye publik) akan pentingnya pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran atas penelitian “Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Pekalongan”.

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pendataan (verifikasi dan validasi lapangan) yang terdapat dalam aplikasi TUNTAS per tanggal 31 agustus 2024 diperoleh 5 (lima) aktivitas terbanyak ATS di Kota Pekalongan yaitu: anak sebagai pekerja sebesar 53,52%, tidak ada aktivitas rutin (38,30%), bermain HP (3,56%), mengurus keluarga (1,89%), dan anak jalanan (1,14%). Berdasarkan aspek penyebab, aspek sosial merupakan aspek paling dominan sebesar 33,46%, disusul aspek budaya 23,39%, aspek ekonomi 20,67%, dan aspek layanan sebesar 3,10%.
2. Penanganan ATS perlu mendapat perhatian dan dukungan dari semua pihak karena penanganan ATS bukanlah menjadi tanggung-jawab salah satu Perangkat Daerah melainkan multi pihak baik pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat; sehingga dibutuhkan struktur koordinasi, komunikasi, kolaborasi, serta pengaturan keterlibatan dan peran dari masing-masing stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi penanganan ATS di Kota Pekalongan dilakukan melalui: a) Penguatan dan pengembangan kebijakan dan regulasi daerah dalam penanganan ATS di Kota Pekalongan, b) Penguatan dan pengembangan kelembagaan atau organisasi penanganan ATS, c) Penguatan

dalam pendataan ATS dan pengembangan aplikasi, d) Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, serta e) Penguatan literasi dan kapasitas masyarakat dan aparat.

5.2. Saran

Saran ataupun rekomendasi yang dapat diberikan guna meningkatkan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menangani ATS di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penanganan ATS tidak hanya dilakukan pada periode waktu sekarang ini saja, tetapi harus terus-menerus dan berkelanjutan karena untuk memastikan ATS yang telah kembali ke sekolah agar tetap bersekolah hingga menamatkan jenjang pendidikan yang diharapkan dan untuk menangani ATS baru yang muncul di kemudian hari.
2. Upaya penanganan ATS perlu dioptimalkan guna menunjang meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RRLS) sebagai salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan bagian dari komponen dasar dalam keberhasilan membangun kualitas hidup manusia (umur sehat dan panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak).
3. Keberhasilan penanganan ATS akan berkontribusi terhadap capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan 7-18 tahun. Oleh karena APS merupakan salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, maka penanganan ATS harus menjadi prioritas pemerintah daerah sebagai tanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintah wajib yang merupakan hak minimal bagi setiap warga negara.

6. REFERENSI

Andayani, L.D, Yusuf, M., Mambang, dan Toun, N.R. 2021. *Strategi Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur*. Pencerah Publik, Volume 8 Nomor 2, Oktober 2021 Page 33-40:

<http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. 2024. *Aplikasi TUNTAS (Totalitas Upaya Nyata Entaskan Anak Tidak Sekolah)*: <https://tuntas.pekalongankota.go.id/>

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. 2024. *Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025*.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026*.

Badan Pusat Statistik. 2024. *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. (Katalog: 4102002 ISSN 2086-2369 VOLUME 18)

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. 2024. *Kota Pekalongan dalam Angka 2023*.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. 2023. *Profil Pendidikan Kota Pekalongan 2022*.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. 2023. *Statistik Daerah Kota Pekalongan 2023*.

Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. 2024. *Profil Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023/2024*.

Hasan, Muhammad, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Tahta Media Group.

Herlinawati dan Susanto, A.B., 2019. *Strategi Penjangkauan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Program Indonesia Pintar (PIP)*. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, Volume 12, Nomor 1, Agustus 2019.

Hidayanti, Ririn. 2023. *Implementasi Program Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Magelang*. Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan, Volume 12 (33), Edisi September 2023: 52-65.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. 2017. *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City Gerakan Menuju 100 Smart City*. Jakarta Direktorat Aplikasi Informatika.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024.

- Profil Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023.*
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. 2024. *Rapot Pendidikan Tahun 2023.*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2023. *Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah di Indonesia.*
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.*
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif.* Cetakan pertama. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Noviani, L., Budiarti, A.C., Tuhana, dan Setyawati, M. 2023. *Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Sragen.* Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, Volume 7 Nomor 1, Mei 2023, Halaman 92-103: <http://journal.sragenkab.go.id/Permalink/D.OI:10.32630/sukowati.v7i1.379>
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan UNICEF. 2023. *Panduan Teknis Strategi Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Tengah.*
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Cetakan III, 2016. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Cetakan Ke-19, 2013. Bandung: Alfabeta, CV.